

Keterkaitan Dakwah dan Politik: Studi pada Gerakan Wahabiyah

Oleh: Agus Salim Lubis*

Abstract

In scientific studies, dakwah and politics are very different things. Dakwah related to religious in which contain positive values; whereas, politics is sometimes associated with a political relationship with negative values. However, dakwah and politic have integral contiguity in which dakwah contains of politics and become the politics elements; otherwise polititics also support dakwah anytime. This is the focus of this written, specifically for the movement of Wahabiyah in which have a strong political dakwah; particularly in establishing the state and the religious thought in Saudi Arabia.

Kata Kunci: Wahabiyah, Politik, Dakwah



* Agus Salim Lubis adalah Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan alumni S-2 IAIN Sumatera Utara.

Pendahuluan

Dalam studi Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam dan Aliran-aliran Modern dalam Islam terdapat topik pembahasan tentang Gerakan Wahabiyah. Gerakan ini dibangun oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703 – 1787 M/1115 – 1201 H) di Arab Saudi yang kemudian berkembang di sejumlah negara Islam. Di dalamnya terdapat gerakan dakwah dan sekaligus gerakan politik.

Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan pendukung-pendukungnya telah mengadakan gerakan dakwah dalam upaya pemurnian terhadap ketauhidan dan pengamalan keagamaan umat serta memberantas praktek-praktek keagamaan yang dinilainya telah mengandung unsur syirik, *khurafat* dan membawa kekafiran. Dalam gerakan dakwah yang dilakukannya tersebut juga terdapat gerakan jihad.¹ Dengan demikian dalam gerakan dakwah yang dilakukannya tersebut juga mengandung atau melibatkan unsur politik dan berdampak politis.

Perpaduan gerakan dakwah dan gerakan politik yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab beserta pendukung-pendukungnya yang selanjutnya disebut gerakan Wahabiyah tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi keagamaan dan politik di Arab Saudi, melainkan meluas ke berbagai belahan dunia; seperti India, Pakistan, Afghanistan, Mesir, Syria, Irak dan Indonesia. Di negara-negara tersebut muncul tokoh-tokoh dan institusi berpaham Wahabiyah yang gigih mengembangkan paham-paham Wahabiyah dengan dibarengi gerakan-gerakan politik.²

Gerakan yang dilakukan Wahabiyah mendapat tanggapan positif dan negatif dari luar dan dalam Islam. Sebagian pihak memandang gerakan Wahabiyah sebagai suatu hal yang sangat positif dan menyambutnya dengan baik. Namun bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula pihak-pihak yang kurang simpatik dan bahkan menentangnya. Hal ini seperti Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan bahwa Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah orang yang memiliki suatu keutamaan, yakni menjaga akidah dari gejala-gejala syirik dan *khurafat* yang telah mencemarkan dan mengeruhkan sumber dan kejernihannya. Ia telah mengarang buku dan melancarkan gerakan dakwah untuk memusnahkan berbagai fenomena kesyirikan.³ Berbeda dengan penilaian tersebut, Sayyed Hussen Nasr menjelaskan bahwa Wahabi menentang sufisme, paham-paham mistik, filsafat Islam dan hampir keseluruhan tradisi intelektual Islam. Hal tersebut telah mempersempit kehidupan intelektual Islam.⁴ Kemudian seorang penulis Eropa bernama Robert Lacey menjelaskan bahwa Wahabi yang didukung Saudi dalam melakukan dakwahnya telah membunuh beberapa ulama dan orang-orang yang sedang melakukan shalat di masjid, hampir seluruh rumah di Taif diratakan dengan tanah. Dengan tanpa melakukan penyaringan, mereka membantai hampir semua laki-laki yang mereka temui di jalan-jalan. Lebih 400 orang tidak berdosa ikut dibantai dengan cara mengerikan di Taif.⁵

Dari gambaran tersebut, maka dipandang cukup menarik untuk membahas gerakan dakwah Wahabiyah yang mengandung unsur politik. Untuk

¹ Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), hlm. 292.

² *Ibid.*, hlm. 292-295.

³ Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiq al-Aulawiyat*, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 263.

⁴ Sayyid Hossen Nasr, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 146.

⁵ Robert Lacey, *The Kingdom: Arabia and the House of Saud*, (New York: Harcourt Brace Jovannovich, 1981), hlm. 145.

itu akan dibahas latar belakang dan pokok pemikiran Wahabiyah, unsur politik dalam gerakan dakwah Wahabiyah dan unsur dakwah dalam gerakan politik Wahabiyah.

Latar Belakang Wahabiyah dan Pokok-pokok Ajarannya

Penamaan Wahabiyah adalah dinisbahkan kepada nama pendirinya, yakni Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1787 M/1115-1201 H). Penamaan tersebut diberikan oleh pihak-pihak yang kurang senang terhadap gerakan yang dilakukannya dan kemudian dipopulerkan orang-orang Eropa. Adapun Muhammad Ibn Abdul Wahab sendiri menyebutkan gerakan yang dilakukannya dengan nama “*Muwahhidun*” atau “*Muwahhidin*”.⁶ Sebutan Wahabiyah cenderung menunjuk kepada tokohnya, dan sebutan yang kedua menggambarkan pokok pemikirannya.

Muhammad Ibn Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 H/1701 M di Uyainah (Najd) lebih kurang 70 km arah barat kota Riyadh. Ayahnya adalah seorang tokoh agama dan adapun kakeknya merupakan seorang mufti, tempat masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama di Najd. Sejak kecil ia sudah mendapat bimbingan pendidikan agama dari kedua orang tuanya; bahkan sebelum usia 10 tahun, ia sudah hafal 30 juz al-Quran.⁷ Ia belajar fiqh Hambali, tafsir, hadis dan telah diperkenalkan dengan kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim.⁸

Dengan bermodalkan ilmu-ilmu yang diberikan orang tuanya tersebut, ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian ia belajar ilmu hukum di Madinah kepada seorang ulama berasal dari Najd bernama Abdullah bin Ibrahim bin Sayf hingga menerima ijazah dari jalur Imam Ibn Hambal. Dari ulama ini, ia juga mendapat semangat pemikiran pembaharuan Ibnu Taimiyah yang menyerukan umat Islam agar kembali kepada al-Quran dan hadis serta meninggalkan *bid'ah*. Selanjutnya ia belajar hadis kepada Syeikh Muhammad Hayyat sebagai seorang *muhaddis* terkenal di Haramain hingga mendapat ijazah. Selain itu, dari ulama ini ia mendapatkan pengajaran tentang tauhid dan perlunya menentang *taklid*, *bid'ah* dan syirik.⁹

Setelah menuntut ilmu di Haramain, sebelum kembali ke Najd, ia sempat juga berangkat ke beberapa wilayah negeri Islam untuk menuntut ilmu dan menambah wawasan berpikirnya. Ia menetap di Baghdad selama empat tahun, di Kurdistan satu tahun, di Hamadan dua tahun. Ia juga mengembara ke Isfahan dan Qum.¹⁰

Pada setiap negeri Islam yang dikunjunginya, Muhammad Ibn Abdul Wahab melihat praktek-praktek keagamaan masyarakat yang dinilainya telah menyimpang, yakni *bid'ah* dan *khurafat* yang membawa kepada syirik. Hampir di setiap kota dan desa dijumpai kuburan wali atau syekh. Kuburan-kuburan tersebut selalu diziarahi masyarakat muslim untuk meminta pertolongan dan

⁶ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), hlm. 974.

⁷ Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 289.

⁸ Bernard Lewis, Ed., *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III, (Leiden, E.J. Brill, 1971), hlm. 677.

⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 135-136.

¹⁰ Ahmad Amin, *Zu'ama' al-Ishlah fi al-Ashr al-Hadits*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1979), hlm. 10.

menyelesaikan problema kehidupan sehari-hari, seperti agar mendapat jodoh, disembukan dari penyakit, supaya diberi kekayaan dan lain-lain. Tidak hanya itu, tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeramatkan pohon kurma dan batu besar yang selalu mereka puja serta dijadikan tempat mengajukan doa agar dihindarkan dari kesulitan, kesusahan dan persoalan-persoalan kehidupan.¹¹

Kenyataan tersebut juga disaksikan Muhammad Ibn Abdul Wahab pada masyarakat Najd pada saat ia kembali ke kampung halamannya. Bahkan banyak masyarakat Najd, selain memuja kuburan para wali atau syekh serta pohon kurma dan batu-batu besar, juga sudah memiliki kebiasaan meminum arak dan menghisab candu. *Akhlak al-Qurani* tidak dihiraukan lagi dan dekadensi moral sudah demikian parah.¹²

Menurut analisa Ira M. Lapidus, kondisi tersebut erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang krisis akibat bencana alam yang berkepanjangan. Bersamaan dengan itu para amir di Najd selalu bersikap otoriter. Dengan hal tersebut, masyarakat menjadi frustrasi dan mencari jalan keluar dan berupaya mendapatkan perlindungan dan kedamaian batin dengan memasuki tarekat, mendatangi dukun serta menyampaikan permohonan ke tempat-tempat tertentu dan kepada benda-benda tertentu yang dianggap memiliki keramat.¹³

Sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang diperoleh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan berlandaskan kepada al-Quran dan hadis, semuanya itu dinyatakannya telah menyimpang dari ajaran tauhid. Masyarakat muslim yang melakukan hal-hal tersebut telah berbuat syirik dan menjadi kafir yang halal untuk dibunuh. Dalam kaitannya dengan itu, ia mengajukan beberapa pandangan sebagai berikut.

1. Yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang yang menyembah selain dari Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh.
2. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi dari Tuhan, tetapi dari syekh atau wali dan dari kekuatan ghaib. Orang Islam yang demikian itu juga telah menjadi musyrik.
3. Menyebut nama Nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantara dalam doa juga merupakan syirik.
4. Meminta syafaat selain dari kepada Tuhan adalah juga syirik.
5. Bernazar kepada selain Tuhan juga syirik.
6. Memperoleh pengetahuan selain dari al-Quran, hadis dan *qiyas* (analogi) merupakan kekufuran.
7. Tidak percaya kepada *qada* dan *qadar* Tuhan juga merupakan kekufuran.
8. Demikian juga menafsirkan al-Quran dengan *ta'wil* (interpretasi bebas) adalah kufur.¹⁴

Unsur Politik dalam Gerakan Dakwah Wahabiyah

Melihat latar belakang kemunculannya, gerakan Wahabiyah adalah gerakan dakwah yang bertujuan memurnikan atau meluruskan ketauhidan dan memberantas kemusyrikan di kalangan umat Islam. Namun gerakan dakwah

¹¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 23-24.

¹² Katimin, *Op.Cit.*, hlm. 290.

¹³ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge, University Press, 1993), hlm. 128.

¹⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan, Op.Cit.*, hlm. 24-25.

Wahabiyah tersebut mengandung unsur politik dan memberi dampak pada aspek politik.

Dalam bahasa Yunani Kuno, kata politik diambil dari kata "polis" yang berarti "kota atau *city*" dengan makna negara yang berkuasa.¹⁵ Kemudian kata politik dilihat dari bahasa Inggris yaitu *politica* yang berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.¹⁶ Seiring dengan itu, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa politik mencakup beberapa makna sebagai berikut.

1. Negara (*state*), berarti suatu organisasi dalam sebuah wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan (*power*), yakni kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini politik berkaitan dengan semua kegiatan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan.
3. Kebijakan (*Policy*), yaitu semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu, terorganisasi dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau merubah susunan kemasyarakatan.¹⁷

Dua dari makna politik seperti dijelaskan di atas kelihatannya terkandung dalam gerakan Wahabiyah. Gerakan dakwah yang dilakukan Wahabiyah didukung dan melahirkan kekuasaan, memberikan efek kepada terbentuknya negara, serta menghasilkan suatu perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan; terutama sekali pada masyarakat.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa setelah menuntut ilmu dan melakukan suatu perjalanan ke beberapa daerah jazirah Arab, Muhammad Ibn Abdul Wahab kembali ke Najd sebagai kampung halamannya. Di setiap daerah yang dikunjunginya dan termasuk di kampung halamannya sendiri, ia menilai banyak penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam pengamalan ajaran agama. Hal ini mendorongnya untuk melakukan dakwah dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran agama. Namun sistem dakwah yang dilakukannya bersifat keras, kaku dan dengan tindakan-tindakan yang kasar, maka masyarakat mengusirnya dari Najd atau Uyainah, sehingga ia terpaksa berangkat ke Dariyyah. Dengan bantuan inteligen dari Inggris, Muhammad Ibn Abdul Wahab dapat diterima Syeikh Dariyyah bernama Muhammad Saud. Semenjak itu (abad ke-18 sekitar tahun 1744 terjadilah persentuhan antara gerakan dakwah Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan gerakan politik Muhammad Saud yang memiliki hubungan bersifat rahasia dengan Inggris).¹⁸

Hal di atas, lebih jelas lagi seperti dikemukakan Ihsan Ali Fauzi bahwa pada tahun 1747, Muhammad ibn Abdul Wahab tinggal di Dariyyah dan menjadi pemimpin spiritual keluarga besar Saud yang pada masa itu merupakan sebuah kelompok pembesar atau elit lokal yang sedang berusaha untuk memperluas pengaruh dan wewenang. Lantas Muhammad ibn Abdul Wahab menandatangani kerjasama dengan Muhammad ibn Saud. Muhammad ibn Abdul Wahab dan pengikutnya akan mendukung upaya-upaya keluarga Ibn Saud untuk

¹⁵ Abd. Muin Salim, *Konsep Politik dalam al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hlm. 8.

¹⁸ Lihat, Zulhum Abdul Qadim, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 13.

memperluas wewenangnya, dan keluarga Muhammad ibn Saud akan menyebarkan Islam versi Wahabi yang puritan itu.¹⁹ Dengan kerjasama ini, dalam aspek politik, Muhammad ibn Saud mendapatkan legitimasi keagamaan, dan dalam bidang keagamaan, Muhammad ibn Abdul Wahab diuntungkan dengan diangkatnya menjadi *qadhi* serta ajarannya dinyatakan sebagai mazhab resmi.²⁰

Kerjasama antara Muhammad ibn Abdul Wahab atau Wahabiyah dan Muhammad ibn Saud merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Satu diantara keduanya tidak dapat eksis bila berjalan sendiri-sendiri. Kaum Wahabi melayani negara atau setidaknya-tidaknya pihak yang memegang kekuasaan. Demikian pula pihak yang memegang kekuasaan melayani kaum Wahabi. Di wilayah-wilayah yang jatuh dalam kekuasaan mereka, kaum Wahabi memperkenalkan praktik yang secara luar biasa memperluas kekuasaan *instrusif* negara kepada para pelaksana hukum yang mendefinisikan aturan-aturan dan tata perilaku.²¹

Bersamaan dengan gerakan yang dilakukan Muhammad ibn Saud dan Ibn Abdul Wahab, negara-negara Eropa sedang berusaha keras melakukan ambisinya untuk menghancurkan kekuatan Islam, khususnya Khilafah Turki Utsmani. Inggris, Prancis dan Italia membangun konspirasi untuk menghancurkan Khilafah Utsmani yang memiliki kekuasaan sangat kuat dan luas di wilayah Afrika dan Timur Tengah pada umumnya. Dari segi eksternal, mereka berusaha melemahkan kekuasaan Khilafah Utsmani dengan merebut sejumlah wilayah yang dikuasai Khilafah Utsmani. Untuk itu, Perancis mencaplok Syam (Ghaza, Ramalah dan Yafa) tahun 1799, merampas Aljazair tahun 1830, Tunisia tahun 1831, dan Marakesh tahun 1912. Italia menduduki Tripoli (Libia) pada tahun 1911. Kemudian Inggris menduduki Mesir tahun 1882 dan menguasai Sudan tahun 1898.²²

Selain upaya secara langsung melakukan penyerangan dengan kekuatan militer, negara-negara Eropa juga berupaya dengan pendekatan tipu muslihat dari dalam. Ada empat cara yang mereka lakukan; yakni (1) menghembuskan paham nasionalisme, (2) mendorong gerakan separatis, (3) memprovokasi untuk memberontak terhadap Khilafah Utsmani, dan (4) memberi dukungan dana dan senjata melawan Khilafah Utsmani. Strategi inilah yang dilakukan Inggris untuk melemahkan Khilafah Utsmani secara pendekatan internal, yakni dengan mendekati dan memberikan dukungan penuh kepada Muhammad Saud yang berambisi untuk membangun sebuah kekuasaan dan terhadap Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam melakukan gerakan dakwah pemurnian keagamaan umat.²³

Setelah Muhammad Saud dan Muhammad Ibn Abdul Wahab berhasil membangun satu kekuatan pasukan, maka mulai pada tahun 1788 menyerang

¹⁹ Ihsan Ali Fauzi, *Wahhabisme Sebagai Islam Puritan; Ibn al-Wahab, Ajaran Wahhabisme dan Awal Persekutuannya dengan Dinasti Ibn Sa'ud*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Kursus Islam and Civil Society, pada tanggal 5 Januari 2007.

²⁰ Mohammad Abdullah Sindi, *Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud*, e-Bulletin Vol. IV 16 January 2004, www.kanaanonline.org, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 20 WIB.

²¹ Abou Khaled el-Fahd, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Terjemahan Helmi Mustofa, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 83-84.

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *ad-Daulah al-Islamiyah*, (Beirut: Darul Ulum, 2002), hlm. 206-207.

²³ Zulhum Abdul Qadim, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hlm. 13.

dan menduduki Kuwait, lalu menuju utara hingga mengepung Baghdad, menguasai Karbala dan menghancurkan kuburan Husein serta melarang orang menziarahinya. Pada tahun 1803, mereka menduduki Mekah, dan pada tahun 1804 menduduki Madinah serta sekaligus menghancurkan kubah-kubah besar yang menaungi kuburan Rasulullah SAW. Setelah menguasai Hijaz, mereka menuju Syam dan mendekati Hims. Mereka juga berhasil menguasai sejumlah besar wilayah di Syiria hingga Halb (Aleppo).²⁴

Melihat semakin meluasnya kekuasaan Muhammad Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab, terutama sekali terhadap Mekah dan Madinah, maka Khilafah Utsmaniyah mengirim pasukannya yang ada di Mesir untuk menghancurkan kekuatan yang dibangun Muhammad Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. Pada tahun 1818, pasukan Mesir yang dipimpin Ibrahim Pasya berhasil menghancurkan kekuatan Muhammad Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab, dan meratakan Dariyyah.²⁵

Untuk menyelamatkan diri, kelompok Wahabi dan keturunan Muhammad Saud bernama Abdul Rahman ibn Faisal ibn Muhammad Saud melarikan diri meminta perlindungan ke Kuwait yang pada saat itu termasuk wilayah dalam pengaruh Inggris. Di sini anak keturunan Abdul Rahman ibn Faisal ibn Muhammad Saud bernama Abdul Aziz yang menjabat sebagai penerus perjuangan Muhammad Saud dan sekaligus imam atau pemimpin kelompok Wahabi kembali membangun kekuatan. Dengan memanfaatkan penasehat, bantuan dana dan persenjataan dari Inggris, pada tahun 1902 Abdul Aziz berhasil menguasai Riyadh, dan pada tahun 1919 mereka telah dapat menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Puncak perjuangan mereka adalah pada tahun 1932, yakni dengan terbentuknya kerajaan Saudi Arabia.²⁶

Dari uraian-uraian di atas, sangat jelas terlihat adanya unsur politik dalam gerakan dakwah yang dilaksanakan Wahabiyah. Gerakan-gerakan dakwah Wahabiyah didukung penuh oleh Muhammad Saud dan keturunan-keturunannya yang memiliki kekuasaan dan sangat berambisi memperluas dan memperkokoh kekuasaannya. Bahkan dalam gerakan-gerakan untuk membasmi keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan masyarakat yang menurut pandangannya telah mengandung unsur syirik, kelompok Wahabiyah telah menjadi gerakan dakwah kekuasaan. Hal ini seperti dijelaskan Zulhum Abdul Qadim, bahwa gerakan Wahabi yang sebelumnya hanya gerakan dakwah kelompok, berubah menjadi gerakan dakwah kekuasaan. Sebagai implikasinya, paham Wahabi yang semula hanya disebarakan melalui dakwah murni, kemudian disebarakan secara paksa dengan menggunakan pedang dan kekuatan persenjataan.²⁷ Dengan demikian berarti gerakan Wahabiyah selain gerakan dakwah, juga adalah gerakan politik, dan telah berdampak politik, yakni terbentuknya kerajaan Saudi Arabia.

Unsur Dakwah dalam Gerakan Politik Wahabiyah

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa gerakan Wahabiyah telah mengandung unsur politik, dan bahkan dapat juga dikatakan telah menjadi gerakan politik; karena ternyata kelompok Wahabiyah telah membangun kekuatan persenjataan dan selalu terlibat dalam perperangan mendukung

²⁴ Muwaffaq al-Marjih, *Shahwah ar-Rajul al-Maridh*, (Kuwait: Muassasah Shaqr al-Khalij, 1984), hlm. 285.

²⁵ Mohammad Abdullah Sindi, *Op.Cit.*

²⁶ Robert Lacey, *Op.Cit.*, hlm. 145.

²⁷ Zulhum Abdul Qadim, *Op.Cit.*, hlm. 13.

kekuatan Muhammad ibn Saud dan keturunan-keturunannya. Gerakan politik yang dilakukan Wahabiyah ini sangat berpengaruh terhadap gerakan dakwah mereka.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, seperti dijelaskan oleh Abou Khaled el-Fahd, bahwa aliansi yang terjadi antara al-Saud dan Muhammad ibn Abdul Wahab sekitar tahun 1745 hingga 1818, Muhammad ibn Abdul Wahab dan Muhammad ibn al-Saud menyebarkan ide-ide Muhammad ibn Abdul Wahab dan memulai gelombang ekspansi yang berpuncak pada penaklukan sebagian besar semenanjung Arab. Bahkan pada saat kekuatan Muhammad ibn Saud dan Muhammad ibn Abdul Wahab dihancurkan pasukan Mesir yang dipimpin Muhammad Ali atas perintah Khilafah Utsmaniyah Turki, ajaran dan konsep Wahabi tetap hidup diteruskan keturunan Muhammad ibn Saud dan Muhammad ibn Abdul Wahab.²⁸ Dengan demikian berarti setiap gerakan politik yang dilakukan selalu membawa dan mengajarkan paham-paham Wahabi, sehingga paham-paham Wahabiyah tersebut menyebar dan tertanam pada masyarakat di setiap wilayah yang dikuasai mereka.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keturunan Muhammad ibn Saud bernama Abdul Aziz dan kelompok Wahabiyah pada tahun 1902 berhasil menguasai Riyadh, dan pada tahun 1919 telah dapat menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Puncak perjuangan mereka adalah pada tahun 1932, yakni dengan terbentuknya kerajaan Saudi Arabia. Dengan hal ini, maka ideologi Wahabiyah berkembang secara kokoh. Di bawah kepemimpinan Abdul Aziz, ideologi Wahabiyah menjadi sebuah identitas kebangsaan di antara masyarakat semenanjung Arabia yang berbeda-beda secara etnis dan kesukuan itu. Riyadh yang merupakan ibu kota Saudi Arabia menjadi pusat studi dengan format paham Wahabiyah. Kehidupan di ibukota dicirikan oleh keselarasan dalam perilaku umum yang berasal dari hasrat orang-orang beriman dan para warga negara pemerintahan Wahabiyah.²⁹

Dengan perpaduan pemerintah Saudi Arabia dengan Wahabiyah, maka ajaran Wahabiyah secara resmi dijalankan kebanyakan masyarakat Saudi Arabia yang merupakan salah satu dari negara-negara yang paling berpengaruh di seluruh negara Islam. Kelompok Wahabiyah juga memegang kendali dan pemeliharaan dua tempat paling suci Islam, yakni Madinah dan Mekah. Dengan demikian para tamu yang berjuta-juta orang setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji, diajarkan menurut paham kaum Wahabi. Pada saat yang sama pula, banyak *Ustadz* dan *da'i* Wahabiyah diberi dana yang cukup untuk menyebarkan paham-paham mereka ke berbagai pelosok Saudi Arabia dan beberapa negara Islam.³⁰

Setelah tahun 1953 atau ketika masa kepemimpinan Abdul Aziz berakhir, kepemimpinan Saudi Arabia telah melonggarkan penekanan identitasnya sebagai pewaris ajaran Wahabiyah. Namun dalam masyarakat, pengaruh Wahabiyah tetap terlihat dalam keseragaman pakaian dan perilaku umum lainnya. Hal yang lebih signifikan dari warisan Wahabiyah tampak nyata dalam etos-etos sosial yang menganggap bahwa pemerintah bertanggung jawab atas moral kolektif yang mengatur masyarakat, dari perilaku individu hingga perilaku lembaga, bisnis dan sistem pemerintahan.

²⁸ Abou Khaled El-Fahd, *Op.Cit.*, hlm. 79.

²⁹ John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 162.

³⁰ Lewis, *The Crisis of Islam: Antara Perang Suci dan Teror Islam*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hlm. 134.

Penutup

Dengan uraian-uraian pembahasan tersebut, dapat diambil suatu pengertian, bahwa dakwah dan politik dapat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Aktivitas dakwah dapat dijadikan sebagai penopang aktivitas dan pencapaian tujuan politik. Sebaliknya, kekuatan politik dapat mewarnai aktivitas dakwah dan sekaligus pendukung keberhasilan dakwah. Dari kasus gerakan Wahabiyah ini, tidak salah dilakukan suatu pengintegrasian antara dakwah dengan politik. Namun dalam kaitannya dengan hal ini, satu hal yang patut diwaspadai dan dihindari, yakni dakwah dijadikan sebagai alat pencapaian tujuan politik yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Karena hal ini dapat merusak makna dan tujuan dakwah.

Daftar Bacaan

- Abd Muin Salim. *Konsep Politik dalam al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abou Khaled el-Fahd. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, Terjemahan Helmu Mustofa, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Ahmad Amin. *Zu'ama' al-Ishlah fi al-Ashr al-Hadits*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1979.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.
- Bernard Lewis, Ed. *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III, Leiden, E.J. Brill, 1971.
- Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- _____. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ihsan Ali Fauzi. *Wahhabisme Sebagai Islam Puritan; Ibn al-Wahab, Ajaran Wahhabisme dan Awal Persekutuannya dengan Dinasti Ibn Sa'ud*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Kursus Islam and Civil Society, pada tanggal 5 Januari 2007
- Ira M. Lapidus. *A History of Islamic Societies*, Cambridge, University Press, 1993.
- John L. Esposito. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2011.
- Katimin. *Mozaik Pemikiran Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Lewis. *The Crisis Of Islam:Antara Perang Suci dan Teror Islam*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Miriam Budihardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- Mohammad Abdullah Sindi. *Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud*, e-Bulletin Vol. IV 16 January 2004, www.kanaanonline.org., Diakses pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 20 Wib.
- Muwaffaq al-Marjih. *Shahwah ar-Rajul Al-Maridh*, Kuwait: Muassasah Shaqr Al-Khalij, 1984.
- Robert Lacey. *The Kingdom: Arabia and the House of Saud*, New York: Harcourt Brace Jovannovich, 1981.
- Sayyid Hossen Nasr. *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *ad-Daulah al-Islamiyah*, Beirut: Darul Ulum, 2002.

Yusuf al-Qardhawi. *Fi Fiqf al-Aulawiyat*, Kaherah: Maktabah Wahbah, 1996.

Zulhum Abdul Qadim, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, Beirut: Darul Ummah, 1990.

